

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA DUMAI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KOMINFOTIKSAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
GEDUNG Lt.II MALL PELAYANAN PUBLIK
JL. H.R.SOEBRANTAS KEL. TEL.BINJAI
KEC.DUMAI TIMUR, KOTA DUMAI





PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Lantai II Gedung Mall Pelayanan Publik Jalan H.R. Soebrantas

Teluk Binjai, Dumai Timur Telepon (0765) Fax. (0765) Kode Pos 28826

DUMAI

e-mail: diskominfotiksan@dumaikota.go.id

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.H. KHAIRIL ADLI, M.Si

NIP : 19700511 199101 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 16 Januari 2025 yang bersumber pada :

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah Perubahan Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024/Evaluasi IKU

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 17 Januari 2025

Kepala,



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si

NIP. 19700511 199101 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024. LKIP ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tupoksi organisasi kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Tahun 2021– 2026 Kota Dumai. Adapun Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peran aktif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam rangka mewujudkan good governance.

Selain itu LKIP juga disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai tahun 2024 dalam memberikan layanan kepada masyarakat, beserta beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

Dalam penyusunan LKIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak-pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKIP ini.

Dumai, 16 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian
Kota Dumai,



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai menjalankan fungsi membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 4 (empat) RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik” dan SASARAN yang ke 2 (dua) yang merupakan Tujuan Strategis Organisasi yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab

organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program 13 (tiga) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media;
- Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
- Sub Kegiatan Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi.

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
- Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.1
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	3 Indeks
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	67,23%
		Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	71%
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%

		Persentase Persandian Informasi	Penyelenggaraan untuk Pengamanan	100%
--	--	---------------------------------------	--	------

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan Anggaran sebesar 14.336.993.240 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) untuk melaksanakan 5 (lima) Program Kerja antara lain :

Tabel.2
Program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 4.986.235.884,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 3.069.000.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 5.884.757.356,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 198.500.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 198.500.000,-	APBD
J U M L A H		Rp 14.336.993.240,-	APBD

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 27 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.3
Perubahan Program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 6.186.536.244,-	APBD-P
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 4.769.000.000,-	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 6.159.397.356,-	APBD-P
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 230.300.000,-	APBD-P
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 168.720.000,-	APBD-P
J U M L A H		Rp 17.513.953.600,-	APBD-P

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.4
Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	3 Indeks	3,90 Indeks	130%	✓			
2.	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah	67,23%	98,93%	147,15%	✓			

sistem informasi daerah yang baik	Daerah							
	Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	71%	71%	100%	✓			
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	100%	125%	✓			
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	80%	80%			✓	

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori 1 (satu) dan 3 (tiga) yaitu Sangat Behasil dan Cukup Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.513.953.600,- (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) bersumber dari APBD & APBD-P Kota Dumai. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 16.261.663.530,- (Enam Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp 1.252.290.070,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

1.	Belanja Operasi	:	Rp.	16.261.663.530,-
2.	Belanja Modal	:	Rp.	1.252.290.070,-
	Jumlah	:	Rp.	17.513.953.600,-

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan: Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	3 Indeks	3,90 Indeks	130%	772.159.800	595.839.400	77,16%
Sasaran: Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	67,23%	98,93%	147,15%	5.387.237.556	3.608.727.257	66,98%
	Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	71%	71%	100%	4.769.000.000	2.836.049.191	59,46%
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	100%	125%	230.300.000	159.975.000	69,46%
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	80%	80%	168.720.000	139.695.370	82,79%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	100%	100%	100%	6.186.536.244,-	5.487.148.366,-	88,69%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	90%	90%	100%	4.769.000.000,-	2.836.049.191,-	59,46%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	22%	22%	100%	6.159.397.356,-	4.204.566.657,-	68,26%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	100%	125%	230.300.000,-	51.612.000,-	69,46%
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	80%	80%	168.720.000,-	161.692.800,-	82,79%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
1.	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	130%	77,16%	1,79	Efisien	-
2.	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	147,15%	66,98%	1,79	Efisien	-
		Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informaasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	100%	59,46%	1,67	Efisien	-
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125%	69,46%	1,79	Efisien	-
		Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	80%	82,79%	0,96	Efisien	-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama 1 (satu) yaitu Indeks Layanan SPBE tingkat efisiensinya adalah 1,79 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (130%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- b. Pada Indikator Kinerja Utama 2 (dua) yaitu Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah tingkat efisiensinya adalah 1,79 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (147,15%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (66,98%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) yaitu Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) tingkat efisiensinya adalah 1,67 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (59,46%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama 4 (empat) yaitu Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral tingkat efisiensinya adalah 1,79 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (125%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (69,46%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- e. Pada Indikator Kinerja Utama 5 (lima) yaitu Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tingkat efisiensinya adalah 0,96 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Cascading Kinerja	7
1.6 Peta Proses Bisnis	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KOMINFOTIKSAN	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMINFOTIKSAN	22
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024	24
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2024	27
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra	32
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target/SPM)	35
3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	35
3.6 Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	49
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
3.8 Prestasi dan Penghargaan	53
3.9 Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR LAMPIRAN DINAS KOMINFOTIKSAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Kominfotiksan Kota Dumai
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta Lampiran Perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan 2024

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023	10
Tabel II. 1	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kominfotiksan Kota Dumai Tahun 2024	16
Tabel II. 2	Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfotiksan Kota Dumai Tahun 2024	18
Tabel II. 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfotiksan Kota Dumai Tahun 2024	19
Tabel II. 4	Perjanjian Kinerja Dinas Kominfotiksan Kota Dumai Tahun 2024	20
Tabel II. 5	Program Kerja Dinas Kominfotiksan Kota Dumai	21
Tabel II. 6	Program Kerja Perubahan Dinas Kominfotiksan Kota Dumai	21
Tabel III. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III. 2	Atribut Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel III. 3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024	27
Tabel III. 4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	35
Tabel III. 5	Hasil Evaluasi Indeks Layanan SPBE	37
Tabel III. 6	Pelaksanaan SPBE Kota Dumai	37
Tabel III. 7	Alokasi Bandwith Internet Tahun 2024	40
Tabel III. 8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan	49
Tabel III. 9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Tabel III. 10	Prestasi dan Penghargaan	53
Tabel III. 11	Ringkasan Anggaran & Realisasi Tahun 2024	54

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Dinas Kominfotiksan Kota Dumai	5
Gambar I. 2	Cascading Kinerja Dinas Kominfotiksan Kota Dumai	8
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis Dinas Kominfotiksan Kota Dumai	9
Gambar II. 1	Misi ke - 4 Kota Dumai	15
Gambar III.1	Dokumentasi dan Surat undangan sosialisasi KIM	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) ;
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (Responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah,

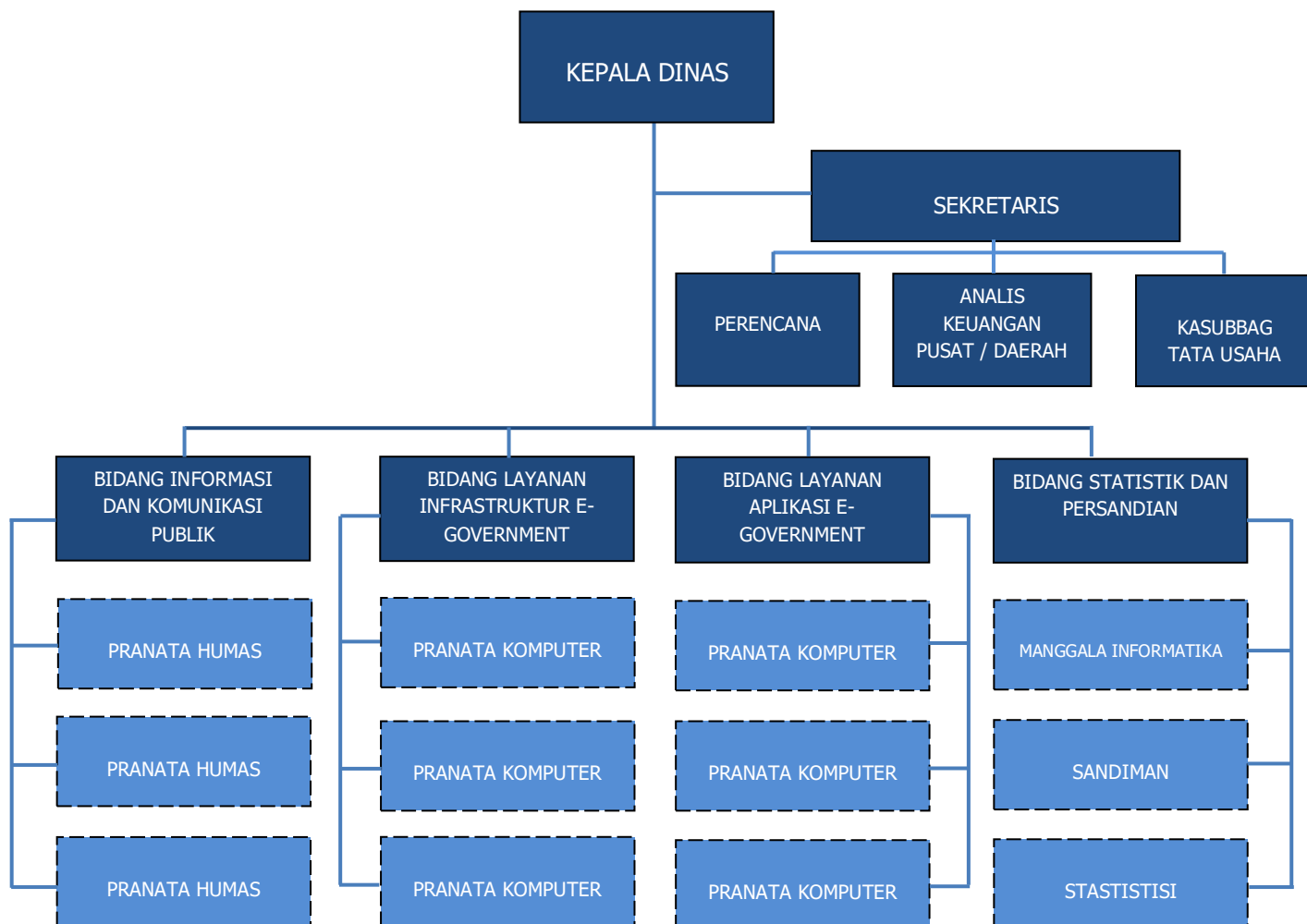
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijaksanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastuktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Layanan Infrastuktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastuktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
4. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastuktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Perencana; dan
 - Analis Keuangan Pusat / Daerah;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - Pranata Humas;
 - Pranata Humas;
 - Pranata Humas;
- d. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, terdiri dari:
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
- e. Bidang Layanan Aplikasi E-Government, terdiri dari:
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
 - Pranata Komputer;
- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 - Manggala Informatika;
 - Sandiman;
 - Statistisi;
- g. Kelompok Jabatan Struktural.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Dumai



Sampai dengan Desember 2024, jumlah ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sebanyak 26 orang. Dari total 26 ASN tersebut, berdasarkan golongan terbanyak adalah ASN golongan III sebanyak 16 orang atau sebesar 61,53%, disusul dengan ASN golongan II sebanyak 4 orang atau sebesar 15,38%, Disusul dengan ASN golongan I sebanyak 1 orang atau sebesar 3,84%. Sedangkan jumlah ASN golongan IV sebanyak 5 orang atau sebesar 19,23%.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu stategis terkait dengan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang perlu ditangani antara lain:

1. Perlunya pemantapan optimalisasi penerapan kebijakan internal, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan, pemanfaatan media komunikasi publik;
3. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai;
4. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah;
5. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;

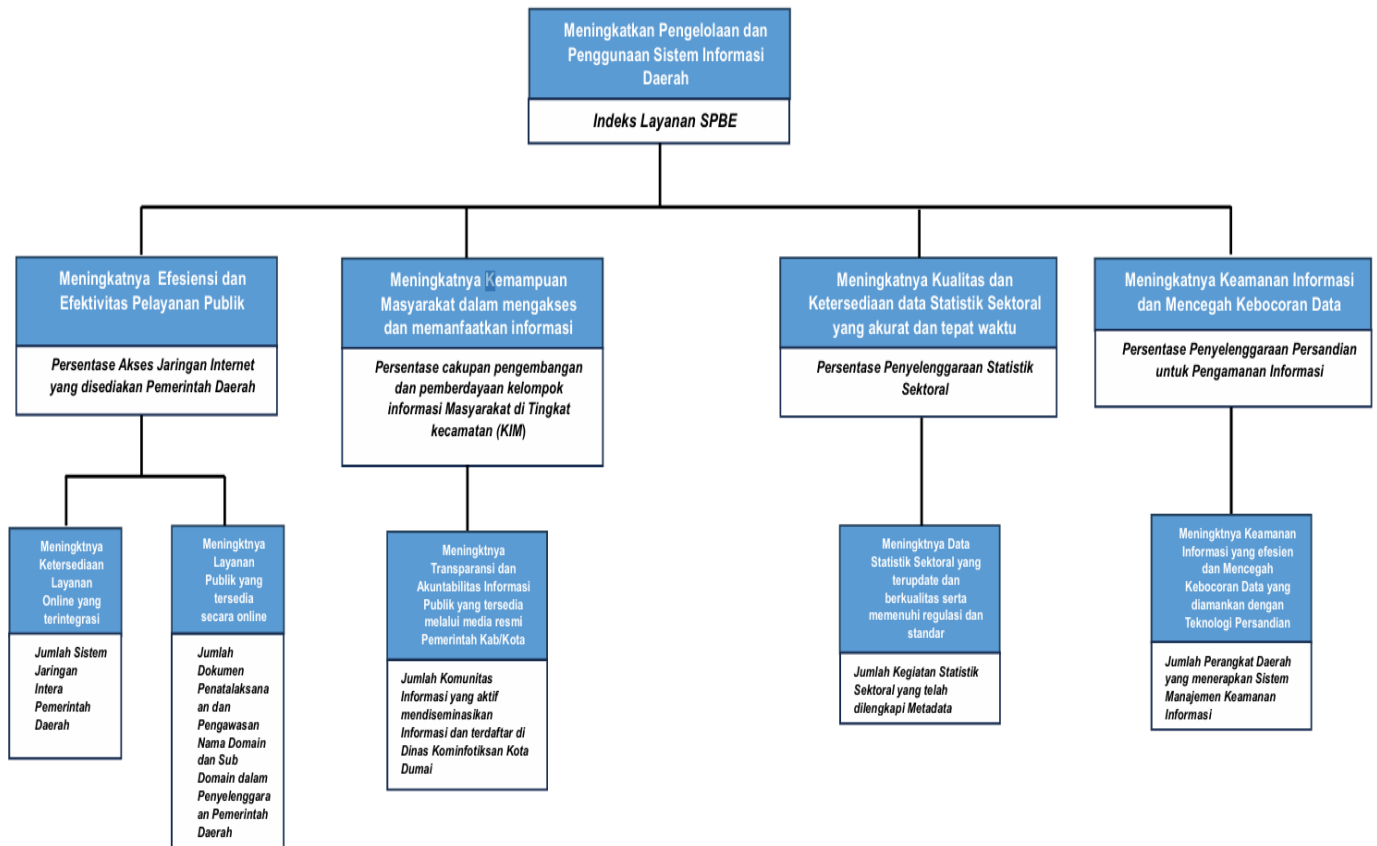
6. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.2

Cascading atau Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagaimana skema berikut :

Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1330.01/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Impelementasi SAKIP Internal Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel I.1
Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2023	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Diupayakan agar memiliki panduan teknis perencanaan kinerja dengan berpedoman pada peraturan yang sudah ada, dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Kinerja	Saat ini pedoman teknis perencanaan kinerja sedang disusun oleh pemerintah kota Dumai, sehingga DISKOMINFOTIKSAN belum bisa menyusun pedoman teknis terkait perencanaan kinerja di internal DISKOMINFOTIKSAN. Dalam penyusunan dokumen perencanaan DISKOMINFOTIKSAN saat ini berpedoman langsung pada PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, sedangkan untuk penyusunan perjanjian kinerja berpedoman pada PERMENPANRB No. 53	Seluruh Bidang	20 Februari 2024	Sekretariat Diskominfo	Tercapai	PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 & PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014 dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/1iSiKMxpHX2rgVsv1fjnneGt5LB9IU11-/view?usp=drive_link & https://drive.google.com/file/d/1GEIILCzHLiMjr5xRMTmxZucOhh3tie/view?usp=drive_link

		Tahun 2014.					
2	Dalam Perencanaan Kinerja jika ada kegiatan/subkegiatan yang saling berhubungan dengan Bidang/seksi/unit lainnya harus ada pola Koordinasi (aktivitas kegiatan/pendanaan) yang lebih detail dan transparan	Keterkaitan antar program/kegiatan/subkegiatan yang ada di dinas KOMINFOTIKSAN tertuang pada Crosscutting	Seluruh Bidang	20 Februari 2024	Sekretariat Diskominfortiksan	Tercapai	Crosscutting pada setiap bidang dinas KOMINFOTIKSAN dapat dilihat pada link berikut : https://drive.google.com/file/d/19gKArIhK1qpnDMkRCTG2YsunDLtnfg/view?usp=drive_link
3	Semua Pegawai agar menyusun dan menetapkan SKP awal tahun (Perjanjian Kinerja) berisi kegiatan, target, waktu/dana yang telah di koordinasikan lebih dulu dengan atasan langsung (dialog kinerja) dan	Seluruh pegawai DISKOMINFOTIKSAN telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024.	Seluruh PNS	20 Februari 2024	Sekretariat Diskominfortiksan	Tercapai	Perjanjian Kinerja tahun 2024 DISKOMINFOTIKSAN dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1_hQPWQoZToH9fUxPJwCkDoR1pltSMRaf?usp=drive_link

4	Revisi Dokumen Perencanaan Kinerja harus menyertakan dokumen hasil reviu perubahan perencanaan kinerja dengan tetap berpedoman pada perencanaan kinerja yang lebih baik.	Melakukan revisi terhadap penyusunan Dokumen perencanaan yang berpedoman dengan hasil Reviu Perubahan Perencanaan Kinerja	-	-	-	-	-
---	--	---	---	---	---	---	---

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”.

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar II. 1



2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran

memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Digitalisasi dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Dumai Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS KOMINFOTIKSAN		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks	Indeks Layanan SPBE	Meningkatkan Pengelolaan dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya Pengelolaan dan Penggunaan Sistem Informasi Daerah yang baik	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah Persentase Cakupan Pengemb

	Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Inovasi Daerah.				angan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
--	--	--	--	--	--

2.3 Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Indeks Layanan SPBE 2. Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah 3. Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media 4. Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral 5. Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	- Indeks Layanan SPBE	3 Indeks
		- Persentase Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	67,23%
		- Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	71%
		- Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%
		- Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.17.513.953.600,- (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) untuk melaksanakan 5 (Lima) Program Kerja antara lain :

Tabel II.5
Program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.4.986.235.884,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.3.069.000.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.5.884.757.356,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 198.500.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 198.500.000,-	APBD
J U M L A H		Rp. 14.336.993.240,-	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 28 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Perubahan Program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.6.186.536.244,-	APBD-P
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.4.769.000.000,-	APBD-P
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.6.159.397.356,-	APBD-P
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 230.300.000,-	APBD-P
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 168.720.000,-	APBD-P
J U M L A H		Rp. 17.513.953.600,-	APBD-P

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus :
$$:capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel III.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024

a. Indikator Indeks Layanan SPBE

Capaian Kinerja untuk Indikator Indeks Layanan SPBE menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3,00 Indeks, dengan realisasi sebesar 3,90 tercapai atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,43 atau tercapai sebesar 120,35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 130%.

Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024
Efisiensi Anggaran	1,79
Nilai Anggaran	Rp. 772.159.800

Capaian 2024	130%
Target	3,00
Realisasi	3,90

b. Indikator Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 67,23% realisasi sebesar 98,93% tercapai bahkan melebihi target Indikator atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 221 titik akses, sedangkan 2024 sebesar 267 titik akses bila di persentasekan capaian tahun 2024 meningkat sebesar 120,81%.

Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024
Efisiensi Anggaran	1,79
Nila Anggaran	Rp. 5.387.237.556
Capaian 2024	147,22%
Target	67,23%
Realisasi	98,93%

c. Indikator Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru, sesuai dengan Dokumen Perubahan RPJMD dan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021-2026. Indikator Sebelumnya yaitu Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media, adapun capaian indikator ini menunjukkan capaian yang tetap.

Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 71% realisasi sebesar 100% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dengan menyesuaikan IKU sebelumnya tercapai sebesar 100%.

Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024
Efisiensi Anggaran	1,67
Nila Anggaran	Rp. 4.769.000.000
Capaian 2024	100%
Target	71%
Realisasi	71%

d. Indikator Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80% realisasi sebesar 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi dengan persentase 125%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% maka capaian tahun 2024 sama realisasinya.

Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024
Efisiensi Anggaran	1,79
Nila Anggaran	Rp. 230.300.000
Capaian 2024	125%
Target	80%
Realisasi	100%

e. Indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 80% atau bernilai kinerja rendah dengan persentase 80%. Bila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 80% maka capaian tahun 2024 sama realisasinya namun tidak tercapai targetnya.

Capaian Kinerja 2024	Realisasi 2024
Efisiensi Anggaran	0,96
Nila Anggaran	Rp. 168.720.000
Capaian 2024	80%
Target	100%
Realisasi	80%

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya sebagai berikut :

Tabel III.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
			dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024	dst	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE		2,83	2,85	3		2,63	3,43	3,90		92,93%	120,35	130%
2.	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik dst	Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah		90	94	-		111	121	-		123%	128,72	-
		Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah		-	-	67,23%				98,93%		-	-	147%
		Persentase Informasi Daerah yang disampaikan melalui media		85%	88%	-		85%	88%	-		100%	100%	-
		Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan				71%				71%				100%

	Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)												
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sekotral		75%	75%	80%		75%	80%	80%		100%	106,66 %	100%
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		75%	75%	100%		75%	80%	80%		100%	106,66 %	80%

Dari Perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai selama 5 Tahun kedepan. Indikator Pertama adalah Indeks Layanan SPBE, Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama Walikota Dumai namun yang menjadi pelaksana atau leading sektor nya adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dengan target pada tahun 2022 adalah 2,83 berasal dari perhitungan $Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$ dengan realisasi sebesar 2,63 dan dengan persentase sebesar 92,93%.
 - b. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahkan menjadi tertinggi se-Provinsi Riau dan meraih kategori “Baik”. Realisasi pada tahun 2023 adalah 3,43 dengan capaian 120,35% dari target yang ditetapkan adalah 2,85.
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik kembali secara signifikan menjadi kategori “Sangat Baik” dan Realisasinya adalah 3,90 dengan rincian capaian kinerja 130% dari terget yang ditetapkan adalah 3,00.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023			
		Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi lebih baik/rendah	Capaian lebih baik/rendah
Efisiensi Anggaran	1,79				
Nilai Anggaran	Rp. 772.159.800				
Capaian 2024	130%	3,43	120,35%	lebih baik	lebih baik
Target	3,00				
Realisasi	3,90				

2. a. Indikator Kinerja Utama yang kedua adalah Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah, Indikator ini merupakan Indikator yang menjadi Prioritas Walikota dalam hal penunjang pelayanan digitilisasi. Output dari Indikator ini yaitu penyediaan akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai, adapun target dari indikator ini pada tahun 2022 adalah 90 titik akses berasal dari perhitungan $\frac{\text{Jumlah Opd.upt.lpmk}}{\text{Titik Akses internet}} \times 100\%$ dengan realisasi sebesar 111 titik akses dengan persentase sebesar 123,33%.

b. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan target 94 titik akses dan Realisasi pada tahun 2023 adalah 221 titik akses dengan capaian persentase 235,10%. Adapun titik akses yang dimaksud adalah jumlah seluruh perangkat daerah, kelurahan, Puskesmas, LPMK dan ruang terbuka dalam lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

c. Pada tahun 2024 Indikator ini terjadi perubahan target Indikatornya yang sebelumnya titik akses menjadi persentase yaitu persentase akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 indikator ini juga mengalami kenaikan realisasinya adalah 98,93% dengan target indikator adalah 67,23%.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023			
		Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi lebih baik/rendah	Capaian lebih baik/rendah
Efisiensi Anggaran	1,79	221 titik akses	235,10%	lebih baik	lebih baik
Nilai Anggaran	Rp. 5.387.237.556				
Capaian 2024	147%				
Target	67,23%				
Realisasi	98,93%				

3. a. Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media, output indikator ini merupakan penyebaran Informasi daerah terkait perkembangan Pemerintah Kota Dumai maupun kegiatan Pemerintah Kota Dumai yang berinteraksi dengan masyarakat, dengan melakukan kerjasama Media cetak, online dan elektronik melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Adapun target dari indikator ini pada tahun 2022 adalah 85% berasal dari perhitungan $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$ dengan realisasi sebesar 100% melebihi target yang ditetapkan dengan persentase 117,64%.

b. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama ini mengalami peningkatan dari targetnya sebesar 88% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 88% dengan capaian persentase sebesar 100%.

c. Pada tahun 2024 Indikator ini juga terjadi Perubahan atau pergantian Indikator mengingat Indikator sebelumnya sudah tercapai targetnya bahkan melebihi. Adapun indikator yang baru adalah Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) dengan target indikator 71% dan realisasinya 71% dengan persentase 100%.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023			
		Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi lebih baik/rendah	Capaian lebih baik/rendah
Efisiensi Anggaran	1,67	88%	100%	lebih baik	lebih baik
Nilai Anggaran	Rp. 4.769.000.000				
Capaian 2024	100%				
Target	71%				
Realisasi	71%				

4. a. Indikator Kinerja Utama yang keempat adalah Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor, output indikator ini adalah tingkat akurasi data statistik sektoral yang terintegrasi dan yang telah dilengkapi metada yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Adapun target dari indikator ini pada tahun 2022 adalah 75% berasal dari perhitungan $\frac{\text{Jumlah Data Statistik yang Terkumpul}}{\text{Jumlah Data Statistik Sektor}} \times 100\%$ dengan realisasi sebesar 80% yang melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase 106,66%.
- b. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama ini juga mengalami kenaikan realisasinya dari target yang telah ditetapkan dengan target 75% dan realisasinya adalah 80% dengan persentasae sebesar 106,66%.
- c. Pada tahun 2024 target indikatornya naik menjadi 80% adapun realisasi nya adalah 100%, dan secara persentase indikator ini juga mengalami kenaikan secara signifikan dengan jumlah persentase sebesar 125%.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023			
		Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi lebih baik/rendah	Capaian lebih baik/rendah
Efisiensi Anggaran	1,79				
Nilai Anggaran	Rp. 230.300.000				
Capaian 2024	125%	80%	106,66%	lebih baik	lebih baik
Target	80%				
Realisasi	100%				

5. a. Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, output indikator ini adalah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai. Adapun target dari indikator ini pada tahun 2022 adalah 75% berasal dari perhitungan $\frac{\text{Jumlah OPD yang Melaksanakan Sistem Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ dengan realisasi sebesar 75% atau dengan persentase sebesar 100%.

b. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja Utama ini mengalami kenaikan realisasinya sebesar 80% dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 75% dan dengan persentasae sebesar 106,66%.

c. Pada tahun 2024 target indikator ini naik menjadi 100% adapun realisasinya 80% dan secara persentase realisasi indikator ini mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor dengan jumlah persentase sebesar 80%.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023			
		Realisasi 2023	Capaian 2023	Realisasi lebih baik/rendah	Capaian lebih baik/rendah
Efisiensi Anggaran	0,96	80%	106,66%	lebih baik	lebih baik
Nilai Anggaran	Rp. 168.720.000				
Capaian 2024	80%				
Target	100%				
Realisasi	80%				

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu :

a. Indeks Layanan SPBE

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Indeks Layanan SPBE tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 130% dari target Renstra sebesar 3,00 Indeks dan terealisasi 3,90 Indeks pada tahun 2024.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan dengan target Renstra	
		Target 2024	Capaian terhadap Renstra
Efisiensi Anggaran	1,79	3,00	3,90
Nilai Anggaran	Rp. 772.159.800		
Capaian 2024	130%		
Target	3,00		
Realisasi	3,90		

b. Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah tahun 2024 sudah melebihi dari target Renstra yaitu sebesar 147% dari target Renstra sebesar 67,23% dan terealisasi 98,93% pada tahun 2024.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan dengan target Renstra	
		Target 2024	Capaian terhadap Renstra
Efisiensi Anggaran	1,79	67,23%	98,93%
Nilai Anggaran	Rp. 5.387.237.556		
Capaian 2024	147%		
Target	67,23%		
Realisasi	98,93%		

c. Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)

Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) tahun 2024 sudah cukup dari target Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra sebesar 71% pada tahun 2024.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan dengan target Renstra	
		Target 2024	Capaian terhadap Renstra
Efisiensi Anggaran	1,67	71%	71%
Nilai Anggaran	Rp. 4.769.000.000		
Capaian 2024	100%		
Target	71%		
Realisasi	71%		

d. Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 sudah melebihi dari target Renstra sebesar 125% dari target Renstra sebesar 80% pada tahun 2024.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan dengan target Renstra	
		Target 2024	Capaian terhadap Renstra
Efisiensi Anggaran	1,79	80%	100%
Nilai Anggaran	Rp. 230.300.000		
Capaian 2024	125%		
Target	80%		
Realisasi	100%		

e. Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun 2024 kurang dari target Renstra sebesar 80% dari target Renstra sebesar 100% pada tahun 2024.

Capaian kinerja 2024	Realisasi 2024	Perbandingan dengan target Renstra	
		Target 2024	Capaian terhadap Renstra
Efisiensi Anggaran	0,96	100%	80%
Nilai Anggaran	Rp. 168.720.000		
Capaian 2024	80%		
Target	100%		
Realisasi	80%		

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	3,90	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	98,93%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingka Kecamatan (KIM)	71%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	80%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Layanan SPBE
 - a. **Capaian Kinerja** untuk indikator Indeks Layanan SPBE menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3,00 Realisasi sebesar 3,90

tercapai 130% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 3,43 tercapai 120,35% maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 113,70%

- b. **Faktor Pendukung Capaian Indikator** Indeks Layanan SPBE melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
- Membuat Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Meningkatkan aspek Perencanaan Strategis SPBE dan Penerapan Manajemen SPBE yang pada tahun sebelumnya menjadi titik lemah penilaian
 - Membentuk Tim Kelompok Kerja sesuai dengan indikator yang menjadi penilaian yang dikomando langsung oleh Kepala Perangkat Daerah
 - Menjalin kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- c. **Faktor Penghambat Capaian Indikator** Indeks Layanan SPBE adalah sebagai berikut :
- Terdapat kekurangan SDM/Tenaga ahli yang berkaitan dengan program kinerja
 - Terbatasnya Anggaran yang menjadi penghambat sebagai sarana pendukung tercapainya kinerja.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Indeks Layanan SPBE adalah sebagai berikut :
- Pemantapan lebih khusus untuk beberapa aspek yaitu Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit TIK, Tim Koordinasi SPBE dan Manajemen Layanan yang perlu terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai target Indeks yang lebih baik lagi atau mempertahankan status kategori “sangat baik”.

Hasil Evaluasi Indeks Layanan SPBE
dari tahun 2018 s/d 2024

Tabel III.5 Pelaksanaan SPBE Kota Dumai

Tahun	Nilai Indeks	Predikat	Nilai Indeks Provinsi	Keterangan
2018	2,29	Cukup	-	Sistem Penilaian SPBE tidak ada ada Perbandingan Realisasi Penilaian secara nasional yang ada hanya
2019	2,54	Cukup	-	Tingkat
2020	2,25	Cukup	-	Kementrian/Lemb
2021	2,56	Cukup	2,55 (Cukup)	aga, Tingkat
2022	2,63	Baik	3,00 (Baik)	Provinsi dan Kabupaten/Kota
2023	3,43	Baik	3,01 (Baik)	*Tertinggi se-Riau
2024	3,90	Sangat Baik	3,75 (sangat Baik)	*Tertinggi se-Riau

Adapun predikat Indeks SPBE dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah ini:

Tabel III.6 Pelaksanaan SPBE Kota Dumai

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil perolehan nilai Indeks Layanan SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kota Dumai	3,90	Sangat Baik
2	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,85	Sangat Baik
3	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Siak	3,54	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	3,51	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3,46	Baik
7	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3,23	Baik
8	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3,08	Baik
9	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
10	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,89	Baik
11	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,79	Baik
12	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,54	Cukup
13	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,50	Cukup

2. Indikator Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah

- a. **Capaian Kinerja** untuk indikator Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 67,23% Realisasi sebesar 98,93% tercapai 147% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 target indikator ini masi menggunakan titik akses, jika perhitungan titik akses Indikator ini sudah melebihi target yaitu 121 titik akses dengan target 94 titik akses dengan persentase tercapai 123% maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 119,51%.
- b. **Faktor Pendukung Capaian Indikator** Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah melebihi dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya Peningkatan Anggaran yang disediakan dari Tahun sebelumnya sehingga dapat meningkatkan belanja kapasitas Bandwitdh.
 - Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, seperti jaringan kabel optik, dan jaringan Intranet sehingga memberi

akses jaringan internet ke perangkat daerah yang belum teralokasikan

- Pemanfaatan layanan jaringan infrastruktur TIK untuk penggunaan Pusat komputasi dan Aplikasi
- Kebijakan Pemerintah yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.

c. **Faktor Penghambat Capaian Indikator** Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Kurangnya infrastruktur TIK yang merata, terutama di daerah kelurahan yang jauh, karena luas wilayah Kota Dumai termasuk Wilayah terbesar ke Dua di Indonesia
- Tingginya trafik Jaringan internet yang dapat menurunkan kualitas layanan dan mengakibatkan lambatnya akses internet
- rendahnya kecakapan pengguna internet dalam mengoptimalkan pemakaian internet.
- kurangnya sosialisasi keamanan pemakaian jaringan internet, sehingga sering terjadi serangan cyber seperti spam, phishing, serta pencurian data.

d. **Tindak Lanjut Capaian Indikator** Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Mempeluas cakupan infrastruktur TIK, Khususnya didaerah terpencil dan terisolir dengan membangun lebih banyak jaringan kabel optik, dan tower BPS;
- Meningkatkan literasi, keterampilan maupun etika pengguna TIK dengan menyediakan pelatihan, bimbingan dan sertifikasi;
- Mendorong inovasi dan kreatifitas dibidang TIK dengan memberikan fasilitas;
- Melindungi hak dan kepentingan pengguna TIK dengan menegakkan hukum, standar dan regulasi yang berkaitan dengan keamanan serta privasi;

- Meningkatkan Anggaran Layanan Infrastruktur dan Jaringan TIK fokus kepada Pembangunan Tower dan Jaringan Fiber Optik.

Tabel III.7 Alokasi Bandwith Internet Tahun 2024

DAFTAR TABEL
ALOKASI Bandwith Internet Tahun 2024

NO	LOKASI/OPD	Keterangan
1	SETDA	Terkoneksi
2	BPKAD	Terkoneksi
3	BAPPEDA	Terkoneksi
4	DINKES	Terkoneksi
5	BKPSDM	Terkoneksi
6	DPRD	Terkoneksi
7	KESBANGPOL	Terkoneksi
8	PERKIM	Terkoneksi
9	INSPEKTORAT	Terkoneksi
10	DISPERSIP	Terkoneksi
11	BAPENDA	Terkoneksi
12	DISDIK	Terkoneksi
13	DISKOMINFOTIKSAN	Terkoneksi
14	DLH	Terkoneksi
15	DPMPSTSP	Terkoneksi
16	DISDAMKAR	Terkoneksi
17	BRIDA	Terkoneksi
18	LPSE/OLT II KANTOR ATAS	Terkoneksi
19	DISKOPAR	Terkoneksi
20	PUPR	Terkoneksi
21	DISHUB	Terkoneksi
22	DISPETARU	Terkoneksi
23	DPPPA	Terkoneksi
24	DISPERDAG	Terkoneksi
25	DISNAKER	Terkoneksi
26	DPKUKM	Terkoneksi
27	BPBD	Terkoneksi
28	DINSOS	Terkoneksi
29	SATPOL PP	Terkoneksi
30	DPPKB	Terkoneksi

31	DINAS PERIKANAN	Terkoneksi
32	DINAS KETAPANG	Terkoneksi
33	DISDUKCAPIL	Terkoneksi
34	RSUD	Terkoneksi
35	KECAMATAN BUKIT KAPUR	Terkoneksi
36	KECAMATAN DUMAI BARAT	Terkoneksi
37	KECAMATAN DUMAI KOTA	Terkoneksi
38	KECAMATAN DUMAI SELATAN	Terkoneksi
39	KECAMATAN DUMAI TIMUR	Terkoneksi
40	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	Terkoneksi
41	KELURAHAN BAGAN BESAR	Terkoneksi
42	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR	Terkoneksi
43	KELURAHAN BUKIT NENAS	Terkoneksi
44	KELURAHAN KAMPUNG BARU	Terkoneksi
45	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR	Terkoneksi
46	KELURAHAN GURUN PANJANG	Terkoneksi
47	KELURAHAN BUKIT KAPUR	Terkoneksi
48	KELURAHAN BAGAN KELADI	Terkoneksi
49	KELURAHAN PANGKALAN SESAI	Terkoneksi
50	KELURAHAN PURNAMA	Terkoneksi
51	KELURAHAN STDI	Terkoneksi
52	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	Terkoneksi
53	KELURAHAN LAKSAMANA	Terkoneksi
54	KELURAHAN DUMAI KOTA	Terkoneksi
55	KELURAHAN BINTAN	Terkoneksi
56	KELURAHAN SUKAJADI	Terkoneksi
57	KELURAHAN BUKIT DATUK	Terkoneksi
58	KELURAHAN MEKAR SARI	Terkoneksi
59	KELURAHAN BUKIT TIMAH	Terkoneksi
60	KELURAHAN RATU SIMA	Terkoneksi
61	KELURAHAN BUMI AYU	Terkoneksi
62	KELURAHAN BUKIT BATREM	Terkoneksi
63	KELURAHAN BULUH KASAP	Terkoneksi
64	KELURAHAN JAYA MUKTI	Terkoneksi
65	KELURAHAN TANJUNG PALAS	Terkoneksi
66	KELURAHAN TELUK BINJAI	Terkoneksi
67	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	Terkoneksi
68	KELURAHAN GUNTUNG	Terkoneksi
69	KELURAHAN PELINTUNG	Terkoneksi
70	KELURAHAN MUNDAM	Terkoneksi
71	KELURAHAN TELUK MAKMUR	Terkoneksi

72	KELURAHAN BANGSAL ACEH	Terkoneksi
73	KELURAHAN LUBUK GAUNG	Terkoneksi
74	KELURAHAN BATU TERITIP	Terkoneksi
75	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL	Terkoneksi
76	KELURAHAN SUNGAI GENIOT	Terkoneksi
77	PUSKESMAS DUMAI KOTA	Terkoneksi
78	PUSKESMAS BUMI AYU	Terkoneksi
79	PUSKESMAS DUMAI BARAT	Terkoneksi
80	PUSKESMAS JAYA MukTI	Terkoneksi
81	PUSKESMAS PURNAMA	Terkoneksi
82	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	Terkoneksi
83	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	Terkoneksi
84	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	Terkoneksi
85	PUSKESMAS SEI SEMBILAN	Terkoneksi
86	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	Terkoneksi
TOTAL OPD/KELURAHAN/PUSKEMAS/GEDUNG LAINNYA/PUSAT KERAMAIN		TOTAL PERSENTASE TERKONEKSI
86		98,93%

3. Indikator Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)
 - a. **Capaian Kinerja** untuk indikator Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 71% Realisasi sebesar 71% tercapai 100% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 target Indikatornya berbeda, mengingat adanya pertukaran nomenklatur pada RPJMD Perubahan, namun capaian tahun 2023 menetap/sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.
 - b. **Faktor Pendukung Capaian Indikator** Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi

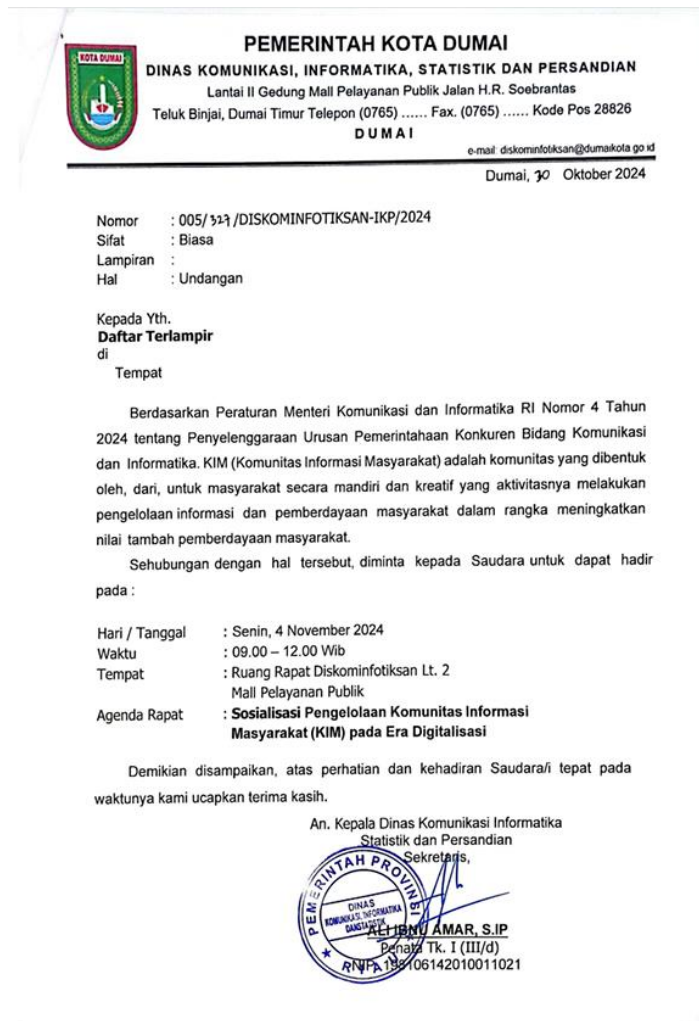
Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) sesuai dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Adanya Konsistensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam menjaga komitmen kerjasama dengan media massa, media cetak, media online maupun media elektronik sebagai salah satu sarana penyampaian informasi dan komunikasi publik serta dengan komunitas yang terlegalitas yang bisa menjadi wadah Kelompok Informasi;
 - Adanya Peningkatan Anggaran yang berkelanjutan guna meningkatkan kerjasama antar media yang bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - Meningkatnya Wadah/Aplikasi Social Media dan Penggunaannya sehingga sangat mempermudah dalam menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi Pemerintah Daerah ke Publik yang ter up to date.
- c. **Faktor Penghambat Capaian Indikator** Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) adalah sebagai berikut :
- Akses Informasi masih belum merata sampai ke seluruh daerah terpencil;
 - Masih terdapatnya masyarakat yang kurang tanggap dalam menerima informasi terkait Pemerintah Daerah yang negatif, hoaks dan Informasi misleading;
 - Masih terdapat Media mitra Pemerintah Daerah yang belum melengkapi Dokumen sebagai syarat untuk komitmen kerjasama.
 - Masih sedikit Komunitas yang belum mempunyai legalitas.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan Melalui Media adalah sebagai berikut :
- Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait cepat tanggap dalam menerima Informasi yang positif dan negatif

agar masyarakat bisa memilah informasi yang lebih baik dan tidak mudah menerima informasi negatif;

- Menyusun peraturan atau badan hukum guna melakukan kerjasama antar media;
- Menciptakan Aplikasi e-wartawan yang berguna untuk menyaring media yang sudah melengkapi persyaratan kerjasama.
- Melakukan Sosialisasi dan Sinkronisasi terhadap Komunitas yang menjadi pusat Kelompok Informasi.

Gambar III.1
Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tahun 2024





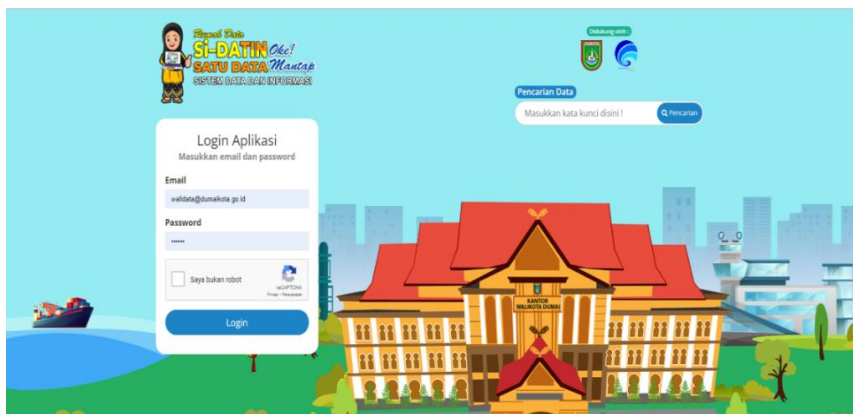
4. Indikator Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. **Capaian Kinerja** untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 80% Realisasi sebesar 100% tercapai 125% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 75% tercapai 80% maka capaian tahun 2024 meningkat dengan tahun sebelumnya sebesar 117%;
 - b. **Faktor Pendukung Capaian Indikator** Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Forum Satu Data dan Sosialisasi Penyusunan Metadata;
 - Pembina data bersama walidata melakukan pembina statistik sektoral ke beberapa OPD;
 - Membuat Aplikasi Pengembangan terhadap data Kota Dumai yakni Aplikasi Sidatin (Sistem Data Informasi) Kota Dumai. Aplikasi Sidatin ini telah dijalankan dan diimplementasikan oleh OPD di Kota Dumai dalam mendukung Satu Data Kota Dumai;
 - Adanya Portal Data dari Bappenas yaitu E-Walidata SIPD yang mana Aplikasi tersebut berisi data data yang langsung terintegrasi ke pusat/kementrian;
 - Tersedianya dukungan Tenaga Teknologi terkait proses penyelenggaraan SDI Kota Dumai;
- c. **Faktor Penghambat Capaian Indikator Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral** adalah sebagai berikut :
- Terdapat kesulitan dalam Pengumpulan Data dari Perangkat Daerah;
 - Sumber Pendanaan yang belum maksimal;
 - Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat, Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Inisiatif Satu Data yang menjadi tantangan.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral** adalah sebagai berikut :
- Terus melakukan koordinasi ke perangkat daerah terkait data sektoral baik melalui alat telekomunikasi maupun turun langsung ke lapangan untuk pembinaan data;
 - Menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
 - Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu atau OPD ang berkontribusi signifikan dan mendukung inisiatif satu data.

1. <https://opendata.dumaiKota.go.id/>



2. <https://sidatin.dumaikota.go.id/>



3. <https://sipd.go.id/ewalidata/>

No	Nama Daerah	Nama Urusan	Data Per Tahapan						
			Perencanaan		Pengumpulan		Pemeriksaan		
			Data Kibak	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Validasi	Pembina	Penyebarluasan
1	1472 - KOTA DUMAI	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	708	671	659	2	689	689	
2	1472 - KOTA DUMAI	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	229	224	224	0	224	224	
3	1472 - KOTA DUMAI	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	474	474	474	0	474	455	
4	1472 - KOTA DUMAI	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIHAN	177	177	177	0	177	176	
5	1472 - KOTA DUMAI	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	182	130	121	9	121	121	
6	1472 - KOTA DUMAI	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	79	78	78	0	78	77	
7	1472 - KOTA DUMAI	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	40	40	40	0	40	40	
8	1472 - KOTA DUMAI	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	41	41	41	0	41	41	
9	1472 - KOTA DUMAI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	49	49	49	0	49	49	
10	1472 - KOTA DUMAI	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	77	77	77	0	77	77	
11	1472 - KOTA DUMAI	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	198	198	197	1	197	197	
12	1472 - KOTA DUMAI	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	85	85	85	0	85	85	

5. Indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. **Capaian Kinerja** untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% Realisasi sebesar 80% tercapai 80% atau bernilai kinerja rendah. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 75% tercapai 75% maka capaian tahun 2024 meningkat dengan tahun sebelumnya sebesar 6,66%;
- b. **Faktor Pendukung Capaian Indikator** Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sesuai dari target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Tersedianya Web Application Firewall untuk memonitor, filter, dan memblokir data yang berasal dari pengunjung atau pengguna ke sebuah website atau aplikasi web;
 - Adanya Portal layanan Otoritas Sertifikat Digital dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pengelolaan Tanda Tangan Pejabat di Pemerintahan Kota Dumai.
- c. **Faktor Penghambat Capaian Indikator** Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah sebagai berikut :
- Belum tersedianya alat atau aplikasi berlisensi untuk menguji tingkat kerentanan (bug) dari sebuah web aplikasi;
 - Belum tersedianya alat pendeteksi dini serangan siber terhadap web aplikasi, server maupun komunikasi pada jaringan;
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah sebagai berikut :
- Melakukan kegiatan Assessment (ITSA) ke web aplikasi yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyempurnakan tingkat keamanan dari sisi web aplikasi.

Sample Pemblokiran Firewall

Time	Action	Country	IP Address	Managed rules
Dec 31, 2023 8:27:11 PM	Block	Germany	62.171.128.225	Managed rules
Matched service				
Service	Managed rules	Ruleset	Unavailable ...376e9aee	Export event JSON
Action taken	Block	Rule	Unavailable ...84534ffa	
Request details				
Ray ID	83e2dbca4a5e37e8	HTTP Version	HTTP/1.1	
IP address	62.171.128.225	Method	GET	
ASN	AS51167 CONTABO	Host	diskpp.dumailkota.go.id	
Country	Germany	Path	//xmlrpc.php	
User agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36	Query string	?rsd	

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel III.8
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1	Indeks Layanan SPBE	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.00	3.90	Indeks	Rp. 772.159.800	Rp. 595.839.400	77,16%
2	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	67,23%	98,93%	Persentase	Rp. 5.387.237.556	Rp. 3.529.501.022	65,51%
3	Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				71%	71%	Persentase	Rp. 4.769.000.000	Rp. 2.844.499.191	59,64%

	(KIM)									
4	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	80%	100%	Persentase	Rp. 230.300.000	Rp. 159.975.000	69,46%
5	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	80%	Persentase	Rp. 168.720.000	Rp. 139.695.370	82,79%

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. III.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Indeks Layanan SPBE	130%	77,16%
2	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Akses jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	147%	65,51%
		Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	100%	59,64%
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	125%	69,46%
		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	80%	82,79%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama* yang pertama yaitu *Indeks Layanan SPBE* tingkat efisiensinya adalah 1,79 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (130%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (77,16%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFESIEN**;
- b. Pada *Indikator Kinerja Utama* yang kedua yaitu *Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah* tingkat efisiensinya adalah 1,79 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (147%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (65,51%). Pencapaian tersebut

- menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFESIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama* yang ketiga yaitu *Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)* tingkat efisiensinya adalah 1,67 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (59,64%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFESIEN**;
 - d. Pada *Indikator Kinerja Utama* yang keempat yaitu *Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor* tingkat efisiensinya adalah 1,79 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (125%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (69,46). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFESIEN**;
 - e. Pada *Indikator Kinerja Utama* yang kelima yaitu *Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi* tingkat efisiensinya adalah 0,96 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (80%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (82,79%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFESIEN**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10
Prestasi dan Penghargaan Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Peringkat I (pertama)	Nasional	Kemenpan-RB
2	KI RIAU AWARD 2024 se-Provinsi Riau : 1. Untuk PPID Kota Dumai 2. Untuk Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Dumai	1. INFORMATIF PPID UTAMA PEMERINTAH KAB/KOTA 2. ACHIEVEMENT MOTIVATION PERSON	Provinsi	Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau
3	Laporan semeseter 1 Pengelolaan SP4N-LAPOR!	Peringkat I (Pertama)	Provinsi	Kemepan-RB
4	Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 di Provinsi Riau	Peringkat II se-Provinsi Riau	Provinsi	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Adapun dokumentasi Prestasi dan Penghargaan yang diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 tercantum di halaman lampiran terakhir.

3.9 Realisasi Anggaran

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.11
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 6.186.536.244	Rp. 5.487.138.366
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 78.137.408	Rp. 46.822.500
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.400.500	Rp. 1.237.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 3.953.500	Rp. 2.124.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 4.575.500	Rp. 642.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 3.187.708	Rp. 3.049.500
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 50.107.800	Rp. 30.250.000
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.912.400	Rp. 9.520.000
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.125.173.600	Rp. 3.910.364.980
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.026.513.600	Rp. 3.846.635.030
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 40.320.000	Rp. 23.880.000

	3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 58.340.000	Rp. 39.849.950
	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 28.200.000	Rp. 21.130.500
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 28.200.000	Rp. 21.130.500
	4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 118.360.000	Rp. 57.861.445
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 27.000.000	Rp. -
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 91.360.000	Rp. 57.861.445
	5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 377.423.760	Rp. 251.930.999
	1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 8.440.760	Rp. 3.399.700
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 44.981.100	Rp. 32.506.500
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 45.262.900	Rp. 29.291.500
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 9.366.000	Rp. 705.500
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 269.373.000	Rp. 186.027.799
	6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 592.200.000	Rp. 510.151.800
	1	Pengadaan Mebel	Rp. 56.000.000	Rp. -
	2	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Rp. 120.800.000	Rp. 120.150.000
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 415.400.000	Rp. 390.001.800
	7	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 695.371.000	Rp. 573.563.337

	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 133.000.000	Rp. 94.030.787
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 562.371.000	Rp. 479.532.550
	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 171.670.476	Rp. 115.322.805
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 24.800.000	Rp. 19.550.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 109.000.000	Rp. 72.617.805
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 32.870.476	Rp. 23.155.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp. 5.000.000	Rp. -
2		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.769.000.000	Rp. 2.836.049.191
	1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.769.000.000	Rp. 2.836.049.191
	1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp.776.201.020	Rp. 454.267.000
	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 630.386.800	Rp. 333.287.246
	3	Pelayanan Informasi Publik	Rp. 251.360.900	Rp. 116.426.630
	4	Layanan Hubungan Media	Rp. 2.328.219.860	Rp. 1.449.129.993
	5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp. 235.122.220	Rp. 146.352.347
	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Rp. 58.006.000	Rp. 53.195.975

		Komunitas		
	7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 489.703.200	Rp. 283.390.000
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Rp. 6.159.397.356	Rp. 4.204.566.657
	1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.192.814.108	Rp. 3.556.351.022
	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.725.600	Rp. 36.350.000
	2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 5.154.088.508	Rp. 3.520.001.022
	2	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 966.583.248	Rp. 648.215.635
	1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Rp. 233.149.048	Rp. 88.726.235
	2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp. 36.000.000	Rp. 33.000.000
	3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 456.090.100	Rp. 402.582.910
	4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp. 192.471.020	Rp. 85.386.490
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp. 48.873.080	Rp. 38.520.000

4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 230.300.000	Rp. 159.975.000
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota		Rp. 230.300.000	Rp. 159.975.000
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 141.907.500	Rp. 91.515.000
	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 88.392.500	Rp. 68.460.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Rp. 168.720.000	Rp. 139.695.370
1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota		Rp. 168.720.000	Rp. 139.695.370
	1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 40.500.000	Rp. 22.050.686
	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 128.220.000	Rp. 117.644.684
TOTAL			Rp. 17.513.953.600	Rp. 12.827.434.584

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia Kota Dumai dari hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan keberhasilan dan **EFESIEN**. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap tahunnya.

Beberapa Permasalahan yang menjadi terkendala nya dalam proses pelaksanaan capaian kinerja yaitu terkendalanya Realisasi atau serapan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai tahun 2024 dikarenakan terjadinya kekosongan Kas atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Dumai. Oleh sebab itu, persentase Realisasi hanya mencapai (77%) dibandingkan dengan tahun 2023 Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai mencapai (98,27%).

B. Langkah dan Perbaikan

Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai dapat berjalan dengan baik perlu mendapat alokasi anggaran yang proporsional, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

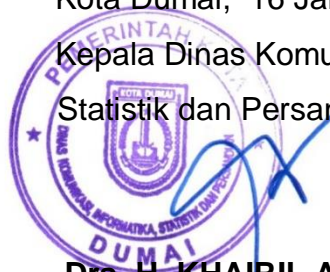
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus

dan ikhlas untuk membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, 16 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Dumai



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700511 199101 1 001



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah / Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Indeks Layanan SPBE	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	67,23%	Kegiatan Pengelolaan e-government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	733.434.200,-
	Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	67,23%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 Unit	5.192.814.108,-
	Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditinjau kecamatan	71%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	71%	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendesiminasikan Informasi dan terdaftar di Dinas Komintotiksan	13 Komunitas	4.769.000.000,-
	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor	80%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektor	80%	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkup daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	1 Dokumen	230.300.000,-
Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 Perangkat Daerah	168.720.000,-	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Bidang Persandian	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	78.137.408,-
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.125.173.600,-

						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	28.200.000,-
						Kegiatan Administrasi Pegawai/Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	118.360.000,-
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	377.423.760,-
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54 Unit	592.200.000,-
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	695.371.000,-
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 Unit	171.670.476,-

Dumai, Januari 2025
KERAJAAN KABUPATEN DUMAI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

Drs. H. KHAIKIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700511 199101 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja 2024 :

1. PK Kepala Dinas



PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS
Jabatan : WALI KOTA DUMAI

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1 Indeks Layanan SPBE 2 Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah 3 Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM) 4 Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral 5 Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3 67,23 71 80 100

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.069.000.000	
2.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 5.884.757.356	
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 198.500.000	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 198.500.000	
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 198.500.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.986.235.884	Pendukung



2. PK Kepala Dinas Perubahan



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si
 Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : H. PAISAL, SKM. MARS
 Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

 H. PAISAL, SKM. MARS

PIHAK PERTAMA

 Drs. KHAIRIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1 Indeks layanan SPBE	3
		2 Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	99
		3 Presentase Informasi Pemerintahan Daerah yang Disampaikan Melalui Media	90
		4 Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80
		3 Presentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	80

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.769.000.000	
2	Program Aplikasi Informatika	Rp. 6.159.397.356	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 230.300.000	
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 230.300.000	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 168.720.000	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.186.536.244	Pendukung
TOTAL		17.744.253.600	

Pihak Kedua

 PAISAL, SKM. MARS

September 2024
 Pihak Pertama

 Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 Panglima Utama Muda
 NIP. 19700511 199101 1 001

3. PK Esselon III



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI IBNU AMAR, S.IP
 Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Drs. H. KHAIRIL ADLI, M. Si
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
 Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

Dumai, September 2024
 PIHAK PERTAMA
 ALI IBNU AMAR, S.IP
 NIP. 19810614 201001 1 021

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2024
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (PPL)	Orang	15
		2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		3. Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
		4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12
		5. Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Paket	12
		6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
		7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		8. Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	Unit	55
		9. Jumlah Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Distabilisasi	Unit	3
		10. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		11. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		12. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		13. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		14. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		15. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
		16. Jumlah Orang yang Memerika Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14
		17. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
		18. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Dokumen	2
		19. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
		20. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
		21. Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan	Unit	1
		22. Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibersihkan (Pajak dan Perorangan)	Unit	3

Sasaran	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp.	91.360.000
		2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	8.440.750
		3. Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Rp.	44.981.100
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	45.762.900
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Rp.	9.366.000
		6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	133.000.000
		7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	562.371.000
		8. Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Rp.	32.870.476
		9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	5.000.000
		10. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	4.400.500
		11. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	3.953.500
		12. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp.	4.575.500
		13. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp.	3.187.708
		14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	50.107.800
		15. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	11.912.400
		16. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	4.026.513.600
		17. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	40.320.000
		18. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progres Realisasi Anggaran	Rp.	58.340.000
		19. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	28.200.000
		20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	269.373.000
		21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Rp.	24.800.000
		22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	109.000.000
		Jumlah	Rp.	5.567.336.244

PIHAK KEDUA
 Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

Dumai, September 2024
 PIHAK PERTAMA
 ALI IBNU AMAR, S.IP
 NIP. 19810614 201001 1 021

4. PK Esselon III Perubahan



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SADDAM, S.STP, M.IP
 Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

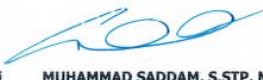
Nama : Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024
 PIHAK PERTAMA


MUHAMMAD SADDAM, S.STP, M.IP
 NIP. 19910207 201206 1 002


Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI


No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase	90

Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik

1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp.	776.201.020
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp.	630.386.800
3	Pelayanan Informasi Publik	Rp.	251.360.900
4	Layanan Hubungan Media	Rp.	2.328.219.860
5	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp.	235.122.220
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Rp. Komunitas	Rp.	58.006.000
7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	489.703.200
Jumlah		Rp.	4.769.000.000

Dumai, September 2024
 Pihak Pertama
 KABID
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


MUHAMMAD SADDAM, S.STP, M.IP
 NIP. 199102072012061002


Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyono, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Layanan Infrastruktur E-Government

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



MULYONO, S.Kom

NIP. 19781219 201001 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Persentase Layanan Publik yang diintegrasikan secara Online dan Terintegrasi	persentase	67,23%

Sasaran 1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp.	5.154.088.508
		2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp.	233.149.048
		Jumlah	Rp.	5.387.237.556

Dumai, Oktober 2024

Pihak Kedua
KEPALA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



Pihak Pertama
KABID LAYANAN
INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT



MULYONO, S.Kom
NIP. 19781219 201001 1 013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADLY RASBULLAH, S.HI., M.IP
 Jabatan : Kepala Bidang Layanan Aplikasi E-Government
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
 Nama : Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
 Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
 Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

 Drs. H. KHAILIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

PIHAK PERTAMA

 FADLY RASBULLAH, S.HI., M.IP
 NIP. 19761208 200604 1 008

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase	22
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase	22

Sasaran Strategis	Sub Kegiatan		Anggaran
Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	38.725.600
	2 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Rp.	36.000.000
	3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.	456.090.100
	4 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Rp.	192.471.020
	5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp.	48.873.080
	Jumlah	Rp.	772.159.800

PIHAK KEDUA

 Drs. H. KHAILIL ADLI, M.Si
 NIP. 19700511 199101 1 001

Dumai, September 2024
 Pihak Pertama
 KEPALA BIDANG LAYANAN APLIKASI
 E-GOVERNMENT

 FADLY RASBULLAH, S.HI., M.IP
 NIP. 19761208 200604 1 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELLY MARINDRA, S.H

Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.SI

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 01 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.SI
NIP. 1970315 199101 1 001

BELLY MARINDRA, S.H
NIP. 19770315 200212 1 009

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1
2		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	Dokumen	1
3		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan Informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Laporan	1
4		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Perangkat daerah	37

Sasaran Program	: Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral Daerah	Rp.	141,907,500
		2. Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp.	88,392,500
		3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp.	40,500,000
		4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	128,220,000
			Rp.	399,020,000



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.SI
NIP. 1970315 199101 1 001

Dumai, 01 Oktober 2024

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG
STATISTIK DAN PERSANDIAN

BELLY MARINDRA, S.H
NIP. 19770315 200212 1 009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD JULI, S.Sos, M.IP

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALI IBNU AMAR, S.IP

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

ALI IBNU AMAR, S.IP
NIP. 19810614 201001 1 021

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD JULI, S.Sos, M.IP
NIP.19670801 200003 1 002

Lampiran Anggaran Abstrak

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

Unit Kerja: Sub Bagian Tata Usaha

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1. Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (SHP)	Orang	15
2		2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12
3		3. Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12
4		4. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12
5		5. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
6		6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7		7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
8		8. Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya yang Diperkirakan	Unit	55
9		9. Jumlah Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan	Unit	3

Sasaran 1	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	91.360.000
	2.	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	8.440.760
	3.	Persediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Rp.	44.980.300
	4.	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	40.262.900
	5.	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	9.366.600
	6.	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	133.000.000
	7.	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	563.371.000
	8.	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Rp.	32.870.476
	9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	5.000.000
	Jumlah	Rp.	932.652.236	

Dumai, September 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

ALI IBNU AMAR, S.IP
NIP. 19810614 201001 1 021

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MUHAMMAD JULI, S.Sos, M.IP
NIP. 19670801 200003 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA MARIYANI, S.Sos

Jabatan : Analis Keuangan Pusat/Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALI IBNU AMAR, S.IP

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2024

PIHAK KEDUA

ALI IBNU AMAR, S.IP
NIP. 19810614 201001 1 021

PIHAK PERTAMA

DINA MARIYANI, S.Sos
NIP. 19860126 200501 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tenwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik.	1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
2		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
3		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1
4		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1
5		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2
6		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
7		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14
8		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
9		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2
10		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
11		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
12		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1
13		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 4.400.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 3.953.500	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 4.575.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 3.187.708	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 50.107.800	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.912.400	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.028.513.600	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 40.320.000	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp. 58.340.000	
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 28.200.000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 269.373.000	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 24.800.000	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 109.000.000	
TOTAL		4.634.684.008	

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

ALI IBNU AMAR, S.IP
NIP. 19810614 201001 1 021

Dumai, September 2024
Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT/DAERAH

DINA MARIYANI, S.Sos
NIP. 198601262005012001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI ZUHERMI, S.Kom

Jabatan : PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MUHAMMAD SADDAM, S.STP, M.IP

Jabatan : KABID. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD SADDAM, S.STP, M.IP
NIP. 199102072012061002

Dumai, September 2024
PIHAK PERTAMA

DEDI ZUHERMI, S.Kom
NIP. 1980071320090311007

Sub Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	120.800.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	415.400.000
3. Pengadaan Mebel	Rp.	56.000.000
Jumlah	Rp.	592.200.000
Jumlah Keseluruhan	Rp.	4.333.638.080

Pihak Kedua
KABID
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

MUHAMMAD SADDAM, S.STP, M.IP
NIP. 199102072012061002

Dumai, September 2024
Pihak Pertama
PRANATA HUMAS

DEDI ZUHERMI, S.Kom
NIP. 1980071320090311007

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI

0.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2024
	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	1 Jumlah Informasi Media Publik	Dokumen	2
		2 Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	4
		3 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	9
		4 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2
		5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45
		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian	persentase	100%
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10

PENGUKURAN KINERJA

Nama OPD : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai

Tahun Anggaran : 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Indeks Layanan SPBE	$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$	3	3,90	130%
		Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemda, PD, UPD, LPMK}}{\text{Jumlah Kebutuhan Akses Jaringan Internet}} \times 100\%$	67,23 %	98,93%	147,15 %
		Persentase Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kota Dumai}} \times 100\%$	71	71	100%
		Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah Data Statistik yang terkumpul}}{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$	80	100	125%
		Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan Sistem Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	100	80	80%

Pagu Anggaran Program Tahun 2024 : Rp. 17.513.953.600
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp. 12.827.434.584
 Persentase Capaian Program Tahun 2024 : 73,24%

Dumai, 16 Januari 2025
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

 Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19700511 199101 1 001

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
REALISASI BELANJA TAHUN 2024**

I	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.042.820.688	5.864.674.012	98,27%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.137.408	46.822.500	59,92%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.400.500	1.237.000	28,11%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.953.500	2.124.000	53,72%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.575.500	642.000	14,03%
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.187.708	3.049.500	95,66%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.107.800	30.250.000	60,36%
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.912.400	9.520.000	79,91%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.125.173.600	3.910.364.980	94,79%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.026.513.600	3.846.635.030	95,53%
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.320.000	23.880.000	59,22%
2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	58.340.000	39.849.950	68,30%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.200.000	21.130.500	74,93%
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.200.000	21.130.500	74,93%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.360.000	57.861.445	48,88%
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000	-	0%
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.360.000	57.861.445	63,33%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.423.760	251.930.999	66,75%
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.440.760	3.399.700	40,27%

5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.981.100	32.506.500	72,26%
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.262.900	29.291.500	64,71%
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.366.000	705.500	7,53%
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.373.000	186.027.799	69,05%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.200.000	510.151.800	86,14%
6.1	Pengadaan Mebel	56.000.000	-	0%
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.800.000	120.150.000	99,46%
6.3	Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	415.400.000	390.001.800	93,88%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.371.000	573.563.337	82,48%
7.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	562.371.000	479.532.550	85,26%
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.000.000	94.030.787	70,69%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.670.476	115.322.805	67,17%
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	24.800.000	19.550.000	78,83%
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.000.000	72.617.805	66,62 %
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.870.476	23.155.000	70,44 %
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	5.000.000	-	0%
9	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota	4.769.000.000	2.836.049.191	59,46%
9.1	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	776.201.020	454.267.000	58,52%
9.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	630.386.800	333.287.246	52,87%
9.3	Pelayanan Informasi Publik	251.360.900	116.426.630	46,31%
9.4	Layanan Hubungan Media	2.328.219.860	1.449.129.993	62,24%
9.5	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	235.122.220	146.352.347	62,24%

9.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	58.006.000	53.195.975	91,70%
9.7	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi	489.703.200	283.390.000	57,86%
10	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat & Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.192.814.108	3.556.351.022	68,48%
10.1	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota	38.725.600	36.350.000	93,86%
10.2	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	5.154.088.508	3.520.001.022	68,29%
11	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintahan daerah kab/kota	966.583.248	648.215.635	67,06%
11.1	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	233.149.048	88.726.235	38,05%
11.2	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	36.000.000	33.000.000	91,66%
11.3	Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	456.090.100	402.582.910	88,26%
11.4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	192.471.020	85.386.490	44,36%
11.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	48.873.080	38.520.000	78,81%
12	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kab/kota	230.300.000	159.975.000	69,46%
12.1	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	141.907.500	91.515.000	64,48%
12.2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	88.392.500	68.460.000	77,45%
13	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	168.720.000	139.695.370	82,79%
13.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	40.500.000	22.050.686	54,44%
13.2	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	128.220.000	117.644.684	91,75%
JUMLAH		17.513.953.600	12.827.434.584	73,24%

KI AWARD TAHUN 2024 :

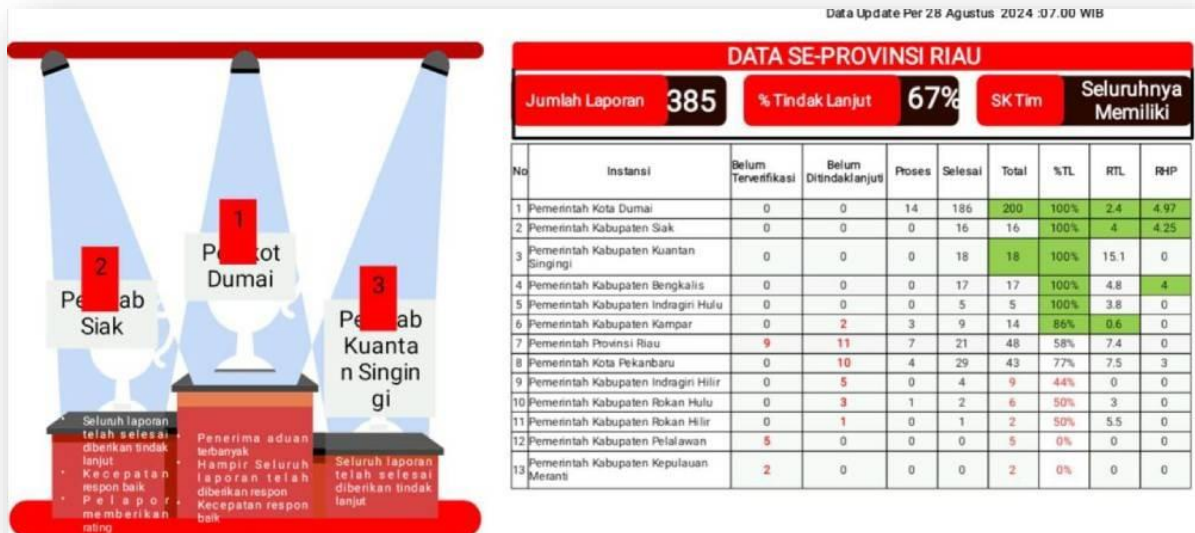


Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 : (*Tertinggi Se-Provinsi Riau)

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,79	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3,46	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	3,51	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Siak	3,54	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3,23	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3,08	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,85	Sangat Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,90	Sangat Baik

Hasil Rekap Laporan SP4N-LAPOR! Se – Provinsi Riau Tahun 2024 :
*Terbaik 1 Se-Provinsi Riau



**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024 :
*Peringkat Ke-2 Se- Provinsi Riau**



